

**RELASI BIROKRASI APARATUR KELURAHAN DAN KARANG
TARUNA DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN
KEPEMUDAAN DI KELURAHAN TEGAL
PARANG JAKARTA SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :

AURA HAFIZ FABRIZIO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

**RELASI BIROKRASI APARATUR KELURAHAN DAN KARANG
TARUNA DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN
KEPEMUDAAN DI KELURAHAN TEGAL
PARANG JAKARTA SELATAN**

Oleh

AURA HAFIZ FABRIZIO

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

RELASI BIROKRASI APARATUR KELURAHAN DAN KARANG TARUNA DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN KEPEMUDAAN DI KELURAHAN TEGAL PARANG JAKARTA SELATAN

Oleh

AURA HAFIZ FABRIZIO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan antara aparatur Kelurahan Tegal Parang dan Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan serta menganalisis relasi birokrasi yang terbentuk dalam pengembangan kegiatan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna terjalin melalui koordinasi, pembagian peran, serta dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan. Relasi birokrasi yang terbentuk mencerminkan prinsip birokrasi Max Weber yang meliputi pembagian kerja, hierarki kewenangan, aturan formal, dan rasionalitas. Relasi tersebut mendukung peningkatan partisipasi pemuda, penguatan kapasitas organisasi, dan keberlanjutan kegiatan. Namun, pelaksanaan birokrasi yang terlalu prosedural masih berpotensi membatasi ruang inisiatif Karang Taruna. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang lebih partisipatif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan kegiatan kepemudaan secara optimal.

Kata kunci: relasi birokrasi, Aparatur Kelurahan, Karang Taruna, kegiatan kepemudaan.

ABSTRACT

RELASI BIROKRASI APARATUR KELURAHAN DAN KARANG TARUNA DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN KEPEMUDAAN DI KELURAHAN TEGAL PARANG JAKARTA SELATAN

By

Aura Hafiz Fabrizio

This study aims to identify the relationship between the Tegal Parang Village administration and Karang Taruna in implementing youth activities and to analyze the bureaucratic relations established in developing such activities. The research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the relationship between village officials and Karang Taruna is built through coordination, role distribution, and resource support in organizing youth activities. The bureaucratic relationship reflects Max Weber's principles of bureaucracy, including division of labor, hierarchical authority, formal rules, and rationality. This relationship contributes to increased youth participation, strengthened organizational capacity, and program sustainability. However, highly procedural bureaucratic practices may limit the initiative of Karang Taruna. Therefore, a more participatory and collaborative relationship is needed to support the effective development of youth activities.

Keywords: bureaucratic relations, Village Officials, Karang Taruna, youth activities.

Judul Skripsi : **RELASI BIROKRASI APARATUR
KELURAHAN DAN KARANG TARUNA
DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN
KEPEMUDAAN DI KELURAHAN TEGAL
PARANG JAKARTA SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Aura Hafiz Fabrizio**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916011063**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Ifaty Fadliana Sari, S.Pd., M.A.

NIP. 198609132019032010

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**



Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.

NIP. 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua : Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A.



Penguji Utama : Junaidi, S.Pd., M.Sos.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP 197608212000032001.



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **4 Juni 2026**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, B. Lampung 35145
Website: <http://sosiologi.fisip.unila.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 04 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Aura Hafiz Fabrizio

NPM 1916011063

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aura Hafiz Fabrizio, lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putra dari Ibu Alfiah.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis dimulai di SD Negeri 02 Pamulang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 1 Ciputat, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 55 Jakarta.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2022, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Pada tahun yang sama, penulis juga mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tepatnya pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi, penulis telah selesai menyusun skripsi yang berjudul “Relasi Birokrasi Aparatur Daerah dan Karang Taruna dalam Pengembangan Kegiatan Kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang, Jakarta Selatan”.

MOTTO

"Fa inna ma'al 'usri yusrā. Inna ma'al 'usri yusrā"

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5–6)

" Success is how many times you get up after falling down "

Kesuksesan adalah seberapa sering kamu bangkit setelah terjatuh

(Pep Guardiola)

"The best decisions aren't made with your mind, but with your instinct."

Keputusan terbaik tidak selalu dibuat dengan pikiran, tetapi dengan naluri

(Lionel Messi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ibuku tercinta, Ibu Alfiah,
serta kakek dan nenekku tercinta, Bapak Suhadi dan Ibu Siti Fatiha.
Terima kasih atas kasih sayang, kepercayaan, doa, dukungan, motivasi, semangat,
dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan kepada saya.
Segala pengorbanan, ketulusan, dan cinta yang telah diberikan menjadi alasan
bagi saya untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.

Kakak dan adik-adikku tercinta,
Raffael Azam Pratama, Keiko Fadia Fadhilla, dan Selena Aiko.
Terima kasih atas dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan.
Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan senantiasa menyertai setiap
langkah kita.

Almamater Tercinta
Sosiologi (FISIP), Universitas Lampung

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Lampung.

Skripsi dengan judul “Relasi Birokrasi Aparatur Kelurahan dan Karang Taruna dalam Pengembangan Kegiatan Kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan” ini dapat diselesaikan berkat partisipasi, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono., S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
6. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya tentang perkuliahan. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan Ibu dalam menjalankan amanah sebagai

Ketua Jurusan dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.

7. Ibu Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luangnya dan memberikan saran serta masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik, Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos., selaku Dosen Penguji, Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Sekretaris Jurusan Sosiologi yang telah banyak membantu dalam proses revisi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, serta membantu dalam masukan mengenai kehidupan pribadi penulis, dan banyak membantu dalam hal administrasi penulis. Terimakasih karena bapak telah banyak membantu dan memberikan masukan yang sangat berarti untuk selesainya skripsi ini. Semoga bapak selalu sehat dan dilindungi disetiap langkahnya oleh Allah SWT.
9. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi atas ilmu yang diberikan selama penulis melaksanakan studi, baik materi akademik maupun motivasi untuk masa yang akan datang.
10. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Daman dan Edi Susanto, S.I. Kom. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Ibu Etti Suryati, SKM., selaku Lurah Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan. Terima kasih telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di wilayah kerja Ibu dan memfasilitasi seluruh proses pengambilan data. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Bapak Achmad Faisal Rizqan, S.H., selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang telah mendampingi penulis dalam proses pengambilan data di Kelurahan Tegal Parang dan membantu semua kebutuhan penelitian, serta

memfasilitasi dan mendampingi peneliti dalam proses penelitian. Semoga Allah berikan kemudahan atas segala urusan bapak baik di dunia maupun Akhirat.

13. Mas Arifin atau Alek, selaku Ketua Karang Taruna RW 06 Kelurahan Tegal Parang yang bersedia untuk berdiskusi, membantu proses penelitian, terbuka dalam berbagi segala informasi terkait kepemudaan di wilayah RW 06, serta mendampingi proses penelitian yang melibatkan pemuda di RW 06. Semoga rezeki mas dilancarkan, diberikan Kesehatan, dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
14. Seluruh Pegawai dan jajaran staf pada Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian. Terimakasih telah membantu penulis dalam mencari data-data pendukung untuk penyelesaian skripsi ini.
14. Ibuku tercinta, Ibu Alfiah yang telah memberikan segala pengorbanan yang tidak akan terbalaskan oleh apapun, motivasi, harapan, material dan spiritual, do'a, semangat, pengertian, kesabaran, kasih sayang, serta pelukan hangat yang membuat penulis kembali merasa lebih nyaman dan tegar selama menjalani pendidikan dan penyelesaian skripsi di Universitas Lampung.
14. Kakek dan Nenekku tersayang, Bapak Suhadi dan Ibu Siti Fatiha. Mereka merupakan sosok kakek dan nenek yang sangat mencintai anak dan cucunya. Terimakasih karena selalu membuat penulis teringat akan segala kebaikan yang diajarkan kepada penulis serta kasih sayang yang melimpah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis semakin semangat untuk segera lulus dan menyelesaikan skripsi ini dan membuktikan kepadanya bahwa cucunya sudah berhasil menyelesaikan pendidikan kuliah S1 dengan cukup baik.
15. Kepada Masku tersayang, Raffael Azam Pratama, S.E MM., yang selalu memberikan energi dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi serta membantu setiap ada kesulitan dalam bentuk apapun. Semoga Masku selalu sehat, dilancarkan segala urusannya, berbakti kepada orang tua dan memiliki masa depan yang cerah.

16. Kepada kedua Adikku tercantik, Keiko Fadia Fadhillah dan Selena Aiko. Terima kasih telah memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliahnya dan dapat membantu Ibu untuk menyekolahkan kalian dengan Pendidikan tinggi, tahun ini Keiko masuk kuliah, semoga kuliahmu dapat lebih lancar sehingga dapat membahagiakan Ibu dan membantu keluarga. Semoga rezeki, urusan, dan keinginan kalian dapat terkabul oleh Allah SWT.
17. Seluruh Om-om dan Tante-tante penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Sosiologi terkhusus Akbar, Kiki, dan Mey yang telah banyak membantu dan juga memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi penulis ini. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT dimanapun kalian berada.
20. Kepada Sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini. Terima kasih Raehan Alfari, S.Kom., yang selama ini sudah berjuang bersama dan saling menyemangati satu sama lain. Semoga silaturahmi kita akan terus terjaga serta selalu diberikan semangat untuk masa yang akan datang serta diberikan kesuksesan oleh Allah SWT dan selalu dilindungi dimanapun berada.
21. Teman-teman seperjuangan Jurusan Sosiologi Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir sampai sekarang. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita mimpikan dan dapat membanggakan keluarga.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026

Aura Hafiz Fabrizio

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Berpikir	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Aparatur Kelurahan	9
2.2 Tinjauan Karang Taruna.....	10
2.3 Tinjauan Relasi Antara Aparatur dan Karang Taruna	12
2.4 Tinjauan Pengembangan Kegiatan Kepemudaan	13
2.5 Teori Birokrasi Max Weber (1978).....	15
2.6 Penelitian Terdahulu	17
III. METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3 Objek Penelitian	22
3.4 Jenis Data	23
3.4.1 Data Primer	23
3.4.2 Data Sekunder	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.5.1 Wawancara	24
3.5.2 Observasi.....	24
3.5.3 Dokumentasi	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	25
3.6.1 Reduksi Data	26
3.6.2 Penyajian Data.....	26
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	26
IV. GAMBARAN UMUM	28
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Tegal Parang.....	28
4.1.1 Kondisi Geografis.....	28
4.1.2 Luas Kelurahan Tegal Parang, menurut Jenis Tanah	29
4.1.3 Luas Kelurahan Tegal Parang, Menurut Peruntukkan Tanah....	29
4.1.4 Data Jumlah RT dan RW	30

4.1.5	Sarana Gedung Pemerintah	30
4.2	Data Demografi	31
4.2.1	Jumlah Penduduk, Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	31
4.2.2	Data Penduduk per-RW	32
4.2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan (Usia 15 Tahun keatas)	33
4.2.4	Jumlah Penduduk Berdasar Agama	33
4.2.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan (Usia 7 Tahun keatas)	34
4.3	Struktur Organisasi	34
4.3.1	Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Parang	34
4.3.2	Struktur Organisasi Karang Taruna RW 06.....	35
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
5.1	Hasil Penelitian.....	36
5.1.1	Identitas Informan	36
5.1.2	Gambaran Relasi Birokrasi Aparatur Kelurahan dan Karang Taruna dalam Pengembangan Kegiatan Kepemudaan.....	37
5.2	Bentuk Kegiatan Kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang	39
5.2.1	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	39
5.2.2	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional.....	42
5.2.3	Kegiatan Olahraga dan Kepemudaan	45
5.2.4	Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	49
5.3	Hubungan Kelurahan dan Karang Taruna dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan.....	53
5.3.1	Pembinaan.....	53
5.3.2	Koordinasi	57
5.3.3	Dukungan Fasilitas dan Sumber Daya.....	60
5.3.4	Partisipasi Karang Taruna	64
5.4	Faktor Pendukung dan Penghambat Relasi Kelurahan dan Karang Taruna	68
5.4.1	Faktor Pendukung.....	69
5.4.2	Faktor Penghambat	71
5.5	Pembahasan.....	74
5.5.1	Relasi Birokrasi dalam Dimensi Pembagian Kerja	74
5.5.2	Relasi Birokrasi dalam Dimensi Hierarki Kewenangan	77
5.5.3	Relasi Birokrasi dalam Dimensi Aturan Formal	81
5.5.4	Relasi Birokrasi dalam Dimensi Rasionalitas	86
5.5.5	Implikasi Relasi Birokrasi terhadap Pengembangan Kegiatan Kepemudaan.....	90
VI.	PENUTUP	96
6.1	Kesimpulan	96
6.1.1	Bentuk Hubungan Kelurahan dan Karang Taruna dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	96
6.1.2	Relasi Birokrasi Aparatur Kelurahan dan Karang Taruna dalam Pengembangan Kegiatan Kepemudaan.....	97

6.1.3 Implikasi Relasi Birokrasi terhadap Pengembangan Kegiatan Kepemudaan.....	97
6.2 Saran	98
6.2.1 Bagi Aparatur Kelurahan	98
6.2.2 Bagi Karang Taruna	98
6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1. Penelitian Terdahulu	17
2. Tabel 2. Luas Kelurahan Tegal Parang (Jenis Tanah)	29
3. Tabel 3. Luas Kelurahan Tegal Parang (Peruntukan Tanah)	29
4. Tabel 4. Data Jumlah RT dan RW Kelurahan Tegal Parang.....	30
5. Tabel 5. Sarana Gedung Pemerintah	30
6. Tabel 6. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	31
7. Tabel 7. Data Penduduk per-RW	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	6
2. Gambar 2. Data Penduduk Berdasar Profesi	33
3. Gambar 3. Data Penduduk Berdasar Agama	33
4. Gambar 4. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan	34
5. Gambar 5. Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Parang	34

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemuda merupakan kelompok sosial yang memiliki posisi strategis dalam proses pembangunan masyarakat karena berada pada fase produktif, adaptif, dan cenderung aktif dalam perubahan sosial (Hilman, 2025). Di Indonesia, peran pemuda tidak hanya dipahami sebagai penerus generasi, tetapi juga sebagai aktor pembangunan yang memiliki kapasitas untuk menciptakan inovasi sosial di tingkat lokal. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2025 mencapai 66,83 juta jiwa atau sekitar 23,5 persen dari total penduduk nasional (BPS, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperempat struktur penduduk Indonesia berada dalam rentang usia muda sehingga pengelolaannya menjadi agenda penting negara. Dalam masyarakat urban, tantangan kepemudaan semakin kompleks karena dipengaruhi perubahan gaya hidup, kompetisi ekonomi, dan terbatasnya ruang partisipasi publik (Arianto, 2024). Situasi ini menuntut adanya lembaga sosial yang mampu menjembatani aspirasi pemuda dengan struktur pemerintahan. Oleh karena itu, hubungan antara organisasi kepemudaan dan birokrasi lokal menjadi isu yang penting untuk dikaji secara sosiologis.

Negara Indonesia telah menempatkan pemuda sebagai subjek pembangunan melalui Undang Undang Nomor 40 (2009) tentang Kepemudaan. Regulasi ini menegaskan bahwa pelayanan kepemudaan diarahkan untuk mengembangkan potensi, kapasitas, dan kepemimpinan pemuda agar mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Kehadiran aturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemudaan tidak dapat dilepaskan dari tata kelola kelembagaan di tingkat lokal. Dalam praktiknya, menurut

Tienrang *et al* (2019), keberhasilan pelayanan kepemudaan sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara aparatur wilayah dan organisasi sosial. Jika hubungan tersebut berjalan baik, maka kegiatan kepemudaan dapat berkembang secara berkelanjutan. Sebaliknya, hubungan yang kaku dan tidak seimbang dapat menghambat potensi pemuda melalui mekanisme administratif yang kurang responsif (Tohari, 2025).

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan memiliki peran penting dalam pemberdayaan generasi muda di tingkat kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 (2019) yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 (2025). Organisasi ini tumbuh dari kesadaran sosial masyarakat dan berfungsi sebagai wadah pengembangan potensi pemuda. Menurut Soliha *et al.* (2024), fungsi Karang Taruna meliputi pemberdayaan sosial, pengembangan kapasitas generasi muda, dan keterlibatan dalam program nasional. Dalam pelaksanaannya, Karang Taruna tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan (Rohadi *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kelembagaan dengan aparatur birokrasi. Namun dalam realitas sosial, hubungan tersebut sering dipengaruhi oleh struktur kewenangan, distribusi sumber daya, dan pola komunikasi antarlembaga. Kondisi ini menjadikan relasi antara kelurahan dan Karang Taruna sebagai ruang penting untuk dianalisis.

Kelurahan sebagai bagian dari struktur pemerintahan memiliki fungsi administratif sekaligus sosial dalam membina masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 (2018) tentang Kecamatan. Aparatur kelurahan menjadi aktor birokrasi yang berinteraksi langsung dengan organisasi sosial termasuk Karang Taruna. Hubungan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan proses pembagian peran dan legitimasi sosial. Ketika birokrasi berjalan secara rasional dan terbuka, organisasi kepemudaan dapat memperoleh dukungan struktural untuk berkembang. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu prosedural dapat membatasi ruang inisiatif organisasi sosial (Hertati, 2024).

Situasi ini dapat dianalisis melalui teori birokrasi Weber (1978) yang menekankan pembagian kerja, hierarki kewenangan, aturan formal, dan rasionalitas dalam organisasi. Dengan demikian, hubungan antara kelurahan dan Karang Taruna dapat dipahami sebagai bagian dari praktik birokrasi dalam mengelola kehidupan sosial masyarakat.

Tantangan kepemudaan semakin meningkat seiring dengan kondisi sosial ekonomi yang dihadapi generasi muda. Data BPS (2025) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,85 persen dengan jumlah 7,46 juta orang yang sebagian besar berasal dari usia produktif muda. Kondisi ini menandakan pentingnya ruang pemberdayaan pemuda di tingkat komunitas sebagai sarana pengembangan keterampilan dan jejaring sosial (Ramadhani *et al.*, 2025). Kegiatan kepemudaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dapat menjadi sarana pembentukan kapasitas sosial ekonomi. Jika dikelola secara efektif melalui kolaborasi lembaga lokal, kegiatan tersebut mampu mencegah eksklusi sosial di kalangan pemuda. Oleh karena itu, kualitas hubungan antara birokrasi kelurahan dan Karang Taruna memiliki implikasi langsung terhadap penguatan peran pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kelembagaan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program kepemudaan.

Wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembinaan pemuda karena ditandai oleh mobilitas tinggi dan heterogenitas sosial. Dalam kondisi tersebut, menurut Gunara (2025) organisasi kepemudaan harus mampu menyesuaikan kegiatan agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda. Kelurahan Tegal Parang menghadapi realitas yang sama sehingga membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Dalam penelitian Lela (2025, Aparatur kelurahan berperan sebagai fasilitator administratif dan mediator kebijakan dalam pengembangan kegiatan pemuda. Namun efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada pola hubungan yang terbangun dengan Karang Taruna. Menurut Mukhlis (2025), hubungan yang partisipatif memungkinkan kegiatan berkembang secara kreatif dan berdaya guna. Sebaliknya, hubungan yang tidak seimbang dapat membatasi kontribusi pemuda dalam pembangunan lokal.

Dalam perspektif sosiologi organisasi, relasi birokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan formal yang ditetapkan. Weber (1978) menekankan bahwa birokrasi ideal dibangun atas dasar kompetensi, pembagian tugas, dan sistem aturan yang jelas. Namun dalam praktiknya, birokrasi sering dipengaruhi oleh nilai informal dan kepentingan lokal (Pecamuya, 2026). Hal ini menyebabkan hubungan antara aparatur dan organisasi masyarakat dapat bergerak antara kolaborasi dan ketegangan. Menurut Ahmad *et al* (2024), Karang Taruna terkadang berada dalam posisi yang bergantung pada keputusan birokrasi, terutama dalam akses sumber daya dan legitimasi program. Di sisi lain, birokrasi juga membutuhkan dukungan sosial dari organisasi pemuda agar kebijakan dapat diterima masyarakat. Hubungan timbal balik ini menunjukkan kompleksitas relasi birokrasi dalam kehidupan sosial.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat melibatkan proses komunikasi, koordinasi, dan pembagian peran yang dinamis. Prasetya dan Jacky (2024) menemukan bahwa Karang Taruna memiliki peran dalam negosiasi kebijakan lokal. Wutoy dan Nugroho (2022) menekankan pentingnya komunikasi dan kepercayaan dalam pembangunan masyarakat. Sementara itu, Setyowati *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur dalam membangun komunikasi partisipatif menentukan efektivitas program. Berbagai penelitian tersebut menegaskan bahwa hubungan kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada wilayah pedesaan dan pendekatan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih spesifik pada organisasi kepemudaan dalam kerangka birokrasi di wilayah perkotaan.

Keterbatasan penelitian sebelumnya membuka ruang kajian baru dalam memahami hubungan antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna di wilayah perkotaan. Struktur kelurahan yang lebih formal membuat relasi kelembagaan dipengaruhi oleh aturan, hierarki, dan distribusi sumber daya. Kondisi ini membedakan karakter hubungan dibandingkan dengan wilayah desa. Penelitian sebelumnya belum banyak membahas bagaimana prinsip birokrasi memengaruhi

hubungan tersebut dalam praktik sehari-hari. Padahal, faktor tersebut menentukan ruang gerak organisasi pemuda dalam menjalankan kegiatan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan birokrasi sebagai kerangka analisis utama. Fokus ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan menjadi relevan untuk mengkaji **Relasi Birokrasi Aparatur Kelurahan dan Karang Taruna dalam Pengembangan Kegiatan Kepemudaan di Tegal Parang Jakarta Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk hubungan kelurahan dan karang taruna dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan?
2. Bagaimana relasi birokrasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna dalam pengembangan kegiatan kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk hubungan kelurahan dan karang taruna dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan.
2. Menganalisis relasi birokrasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna dalam pengembangan kegiatan kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi organisasi, khususnya dalam memahami peran birokrasi lokal dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam

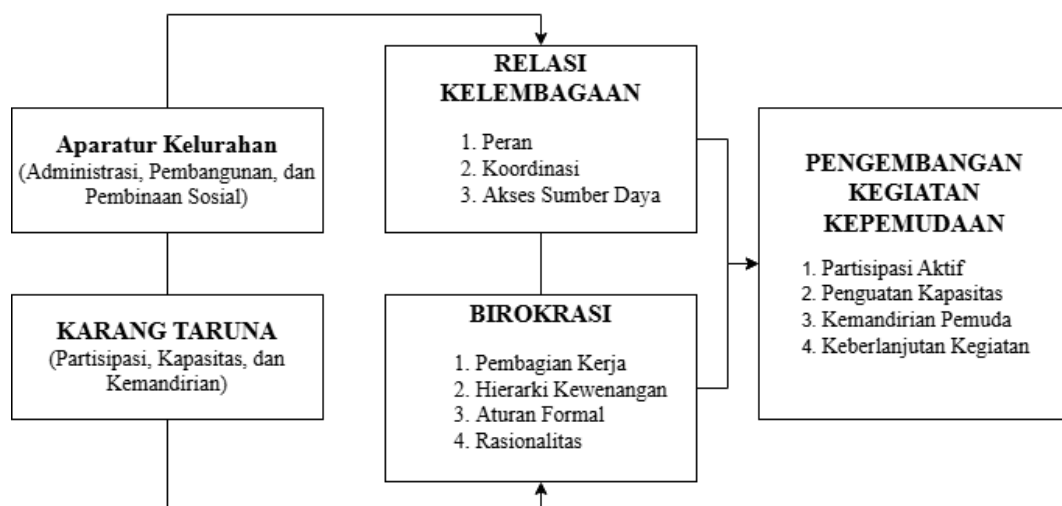
pengembangan analisis berbasis teori birokrasi Max Weber (1978) untuk melihat hubungan antara aparatur pemerintah dan organisasi kepemudaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dinamika birokrasi dalam pengembangan kegiatan kepemudaan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur kelurahan dan Karang Taruna dalam membangun pola kerja yang lebih efektif sesuai prinsip birokrasi yang rasional dan terstruktur. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas koordinasi dan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya hubungan kelembagaan yang lebih optimal sehingga kegiatan kepemudaan dapat berkembang secara berkelanjutan.

1.5 Kerangka Berpikir

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti (2026)

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari hubungan antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang. Aparatur kelurahan dipahami sebagai unsur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam bidang administrasi, pembangunan, dan pembinaan sosial masyarakat. Di sisi lain, Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang berfungsi sebagai wadah partisipasi, pengembangan kapasitas, dan penguatan kemandirian pemuda. Kedua lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda, namun saling membutuhkan dalam menjalankan berbagai program kepemudaan. Hubungan yang terjalin antara keduanya membentuk relasi kelembagaan yang tercermin melalui pembagian peran, proses koordinasi, dan dukungan sumber daya. Relasi inilah yang menjadi dasar untuk memahami bagaimana kegiatan kepemudaan dapat berkembang secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, relasi kelembagaan dianalisis menggunakan teori birokrasi Max Weber yang menekankan pentingnya pembagian kerja, hierarki kewenangan, aturan formal, dan rasionalitas dalam organisasi. Pembagian kerja terlihat dari adanya pembedaan tugas antara aparatur kelurahan sebagai pihak yang mengelola administrasi dan Karang Taruna sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Hierarki kewenangan tampak melalui posisi aparatur kelurahan yang memiliki otoritas formal dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian dukungan terhadap kegiatan kepemudaan. Aturan formal hadir dalam berbagai prosedur yang mengatur pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan. Sementara itu, rasionalitas terlihat dari upaya kedua pihak dalam menjalankan tugas berdasarkan tujuan dan kebutuhan organisasi. Melalui teori Weber, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana mekanisme birokrasi memengaruhi pola hubungan antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna.

Relasi birokrasi yang terbentuk antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna selanjutnya dipandang memiliki pengaruh terhadap pengembangan kegiatan kepemudaan. Hubungan yang berjalan secara baik dapat mendorong meningkatnya partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan sosial dan

kemasyarakatan. Selain itu, kerja sama yang efektif juga berkontribusi pada penguatan kapasitas organisasi dan peningkatan kemampuan anggota Karang Taruna. Dukungan yang diberikan melalui koordinasi dan penyediaan sumber daya dapat membantu pemuda menjadi lebih mandiri dalam merencanakan serta melaksanakan program kegiatan. Keberhasilan hubungan tersebut juga berperan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan sehingga tidak hanya berlangsung secara insidental. Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa kualitas relasi birokrasi antara aparaturnya kelurahan dan Karang Taruna menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan kegiatan kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Aparatur Kelurahan

Menurut Mahbubi (2025), Aparatur Kelurahan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Tugas mereka tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencakup pelayanan publik dan upaya pemberdayaan warga. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, aparaturnya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sekaligus penghubung antara negara dan masyarakat pada tingkat yang paling dekat (Yulambang Sari *et al.*, 2025). Kedudukan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 (2014) tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 (2018) tentang Kecamatan yang menempatkan kelurahan sebagai bagian dari perangkat kecamatan. Berdasarkan aturan tersebut, aparaturnya memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, pembangunan wilayah, dan pembinaan kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, mereka juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi sosial, termasuk Karang Taruna sebagai wadah kepemudaan. Hal ini menjadikan aparaturnya sebagai aktor yang berperan besar dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga (Kamal, 2023).

Dilihat dari sudut pandang sosiologi organisasi, aparaturnya merupakan bagian dari sistem birokrasi yang bekerja melalui susunan kerja yang teratur, pembagian tugas yang jelas, serta aturan yang mengikat setiap proses kerja (Rahman *et al.*, 2024). Struktur ini membentuk hubungan kerja dari tingkat pimpinan hingga pelaksana sehingga setiap posisi memiliki tanggung jawab yang telah ditentukan. Pembagian tugas yang jelas membantu terciptanya koordinasi yang rapi dalam menjalankan program pemerintahan. Namun, menurut Erlangga (2025) sistem yang terlalu bergantung pada aturan juga dapat membuat

pelaksanaan program menjadi kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai susunan organisasi, tetapi juga memengaruhi cara kerja dalam pengambilan keputusan. Sama halnya dengan penelitian Ulung Pribadi (2021) yang menunjukkan bahwa struktur organisasi, akuntabilitas, dan budaya kerja memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa kinerja aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem kerja dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Penelitian Setiyowati dan Indiraswari (2025) juga menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah dipengaruhi oleh komitmen organisasi, penerapan tata kelola yang baik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Hasil ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kerja aparatur tidak dapat dilepaskan dari dukungan masyarakat sebagai bagian dari lingkungan sosialnya. Dalam kajian lain, Budiman (2026) menjelaskan bahwa birokrasi berperan sebagai penghubung antara negara dan masyarakat yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya bekerja dalam urusan administratif, tetapi juga berinteraksi langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam hubungan dengan organisasi seperti Karang Taruna, aparatur kelurahan tidak hanya bertugas menjalankan aturan, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi warga. Peran ini menjadikan aparatur sebagai fasilitator yang mendorong kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, aparatur kelurahan perlu dipahami tidak hanya dari tugas formalnya, tetapi juga dari perannya dalam kehidupan sosial di tingkat lokal (Mahbubi, 2025).

2.2 Tinjauan Karang Taruna

Menurut Rasidah (2025), Karang Taruna dikenal sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan generasi muda di tingkat lokal. Keberadaannya tidak muncul secara terpisah, melainkan berkaitan erat dengan upaya negara dalam mendorong

keterlibatan pemuda dalam pembangunan sosial (Rasidah, 2025). Secara normatif, posisi dan fungsi Karang Taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 (2019) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 (2025). Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Karang Taruna tumbuh dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan. Penegasan ini menunjukkan bahwa Karang Taruna berakar pada kebutuhan sosial yang nyata di lingkungan sekitarnya. Dalam praktiknya, organisasi ini tidak hanya menjadi ruang berkegiatan bagi pemuda, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai mitra pemerintah dalam berbagai program sosial (Fardiansyah *et al.*, 2025). Oleh sebab itu, hubungan antara Karang Taruna dan aparaturnya menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan kepemudaan di tingkat lokal.

Dalam kajian sosiologi organisasi, Karang Taruna dapat dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak lepas dari pengaruh birokrasi di tingkat lokal. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Bastian dan Farihin (2025) yang menunjukkan bahwa Karang Taruna memang tumbuh dari masyarakat, namun tetap berperan aktif dalam mendukung program pemerintah desa seperti kegiatan ekonomi dan sosial. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan Karang Taruna dalam pembangunan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan sistem pemerintahan setempat. Sejalan dengan itu, penelitian Darmawati *et al.* (2022) menegaskan bahwa organisasi kepemudaan memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai penggerak masyarakat dan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa pemuda tidak hanya bertindak sebagai pelaku sosial, tetapi turut mengambil bagian dalam proses pembangunan yang diarahkan oleh kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait antara organisasi kepemudaan dan struktur pemerintahan di tingkat lokal.

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2022) memperlihatkan bahwa Karang Taruna memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi desa melalui pemberdayaan generasi muda dan pengembangan potensi lokal. Meskipun

demikian, pelaksanaan program tersebut tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dari pemerintah desa. Kebutuhan akan koordinasi dan dukungan ini menunjukkan bahwa Karang Taruna berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya mandiri. Di satu sisi, organisasi ini memiliki kebebasan dalam mengembangkan kegiatan berbasis masyarakat. Di sisi lain, keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh hubungan dengan aparat desa atau kelurahan. Oleh karena itu, Karang Taruna dapat dipahami sebagai organisasi yang bergerak di antara kepentingan masyarakat dan sistem pemerintahan. Dengan melihat posisi tersebut, kajian terhadap Karang Taruna tidak cukup hanya membahas aktivitas internalnya, tetapi juga perlu memperhatikan hubungan kelembagaan yang membentuk arah dan kinerjanya.

2.3 Tinjauan Relasi Antara Aparatur dan Karang Taruna

Menurut Bima (2024), relasi antara Aparatur Kelurahan dan Karang Taruna merupakan bagian dari kehidupan kelembagaan di tingkat lokal yang mempertemukan sistem birokrasi dengan organisasi sosial masyarakat. Hubungan ini tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga mencerminkan kerja bersama dalam menjalankan program sosial yang melibatkan pemuda. Aparatur kelurahan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengoordinasikan kegiatan, sementara Karang Taruna berperan sebagai pelaksana sekaligus penggerak partisipasi masyarakat (Kamal, 2023). Interaksi di antara keduanya membentuk pola kerja yang saling bergantung, sehingga keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi yang terbangun. Dalam praktiknya, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus karena dipengaruhi oleh pembagian kewenangan, cara berkomunikasi, serta kemampuan masing-masing pihak dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Rizkiyani dan Mujab, 2024).

Sama halnya dengan penelitian Prasetya dan Jacky (2024) yang menunjukkan bahwa Karang Taruna tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, tetapi juga aktif menjalin hubungan dengan pemerintah desa dalam kehidupan sehari-hari. Karang Taruna sering berada pada posisi yang menghubungkan masyarakat

dengan pemerintah, meskipun tetap berada dalam batas aturan yang ditetapkan oleh struktur pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Perbawa dan Najicha (2022) yang menegaskan bahwa birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan jalannya pemerintahan, namun sering kali diwarnai oleh dominasi aturan dan prosedur yang dapat membatasi keluwesan pelayanan. Selain itu, birokrasi juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan struktur dan budaya kerja, sehingga memengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara aparat kelurahan dan Karang Taruna dapat dipahami sebagai pertemuan antara sistem yang teratur dengan organisasi sosial yang lebih terbuka, yang terus berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Bima, 2024).

2.4 Tinjauan Pengembangan Kegiatan Kepemudaan

Pengembangan kegiatan kepemudaan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda agar mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam Undang Undang Nomor 40 (2009) tentang Kepemudaan dijelaskan bahwa pelayanan kepemudaan diarahkan untuk mengembangkan potensi, kapasitas, kepemimpinan, serta partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Ketentuan ini menegaskan bahwa kegiatan kepemudaan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas biasa, tetapi sebagai sarana pembentukan kemampuan dan tanggung jawab sosial generasi muda (Simanjuntak dan Suyato, 2025). Sama halnya dengan penelitian Fauziah dan Astuti (2023) yang menunjukkan bahwa Karang Taruna mampu menjadi wadah pemberdayaan pemuda melalui peningkatan kepedulian sosial dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. Selain itu, penelitian Ramadhani *et al.* (2025) juga memperlihatkan bahwa Karang Taruna memiliki peran dalam mendorong inovasi sosial dan pemberdayaan ekonomi pemuda di tingkat lokal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kepemudaan memiliki peran yang luas dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.

Pada sisi lain, bentuk kegiatan yang dijalankan dalam organisasi kepemudaan turut menentukan tingkat keterlibatan dan manfaat yang dirasakan oleh pemuda. Penelitian dalam Saharuddin *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pengembangan program berbasis inovasi seperti layanan digital mampu meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang relevan dengan perkembangan zaman dapat menarik minat generasi muda untuk terlibat secara aktif. Sama halnya dengan penelitian Muslim dan Sari (2025) yang menegaskan bahwa organisasi kepemudaan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial melalui kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dalam penelitian tersebut juga terlihat bahwa keterlibatan pemuda tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, kegiatan kepemudaan perlu dirancang secara adaptif agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi generasi muda (Muntazar, 2026).

Dalam praktiknya, pengembangan kegiatan kepemudaan sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan serta hubungan dengan pemerintah setempat (Rohadi *et al.*, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan pemuda berkaitan dengan adanya koordinasi yang baik, akses terhadap sumber daya, serta dukungan dari aparatur pemerintahan dalam bentuk fasilitasi dan pengesahan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan kepemudaan cenderung berjalan terbatas dan sulit berkembang secara berkelanjutan. Menurut Baihaqi dan Martino (2021), hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kegiatan kepemudaan tidak hanya ditentukan oleh aktivitas internal organisasi, tetapi juga oleh hubungan yang terbangun dengan struktur pemerintahan. Dengan demikian, dalam penelitian ini pengembangan kegiatan kepemudaan dipahami melalui efektivitas program, partisipasi pemuda, pengembangan kapasitas, serta keberlanjutan kegiatan sebagai hasil dari relasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna.

2.5 Teori Birokrasi Max Weber (1978)

Pembahasan teori Max Weber (1978) dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana relasi antara aparaturnya kelurahan dan Karang Taruna bekerja dalam pengembangan kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada pemberdayaan. Weber (1978) memandang birokrasi sebagai sistem yang tersusun secara rasional melalui pembagian kerja, aturan, dan kewenangan yang jelas. Dalam praktik di tingkat kelurahan, prinsip ini terlihat dari peran aparaturnya sebagai pengelola administrasi, pengarah program, serta pemberi legitimasi kegiatan pemuda. Namun, relasi tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga membentuk pola interaksi sosial antara negara dan masyarakat. Sama halnya dengan penelitian Susilo *et al* (2025). menunjukkan bahwa Karang Taruna tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga berperan sebagai penggerak masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan berbasis potensi lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa birokrasi dan organisasi pemuda saling terhubung dalam mendorong aktivitas sosial. Dengan demikian, teori Weber (1978) membantu menjelaskan bagaimana struktur birokrasi menjadi dasar dalam membentuk hubungan kerja yang memengaruhi arah kegiatan kepemudaan.

Dalam dimensi pembagian kerja, Weber (1978) menekankan pentingnya distribusi peran yang jelas agar organisasi berjalan efektif. Dalam relasi ini, aparaturnya kelurahan cenderung bertindak sebagai fasilitator kebijakan dan pengelola administratif, sementara Karang Taruna menjadi pelaksana kegiatan di lapangan. Pembagian ini pada satu sisi dapat memperkuat efektivitas program karena setiap aktor memiliki fungsi yang spesifik. Namun pada sisi lain, pembagian kerja yang terlalu kaku dapat membuat Karang Taruna tidak memiliki ruang untuk mengembangkan inisiatif sendiri. Pada penelitian Bastian dan Farihin (2025), terbukti bahwa Karang Taruna mampu meningkatkan kreativitas dan aktivitas ekonomi pemuda ketika diberi ruang untuk berperan lebih luas dalam kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya bergantung pada struktur, tetapi juga pada fleksibilitas peran yang diberikan kepada organisasi pemuda. Dengan demikian, pembagian kerja dalam birokrasi perlu dipahami

sebagai sesuatu yang dinamis, bukan sekadar pembagian tugas yang statis (Salim, 2023).

Hierarki kewenangan dalam teori Weber (1978) juga menjadi aspek penting dalam melihat relasi antara kelurahan dan Karang Taruna. Aparatur kelurahan memiliki posisi formal yang lebih tinggi karena memegang otoritas dalam pengambilan keputusan dan pengesahan program. Sementara itu, Karang Taruna berada pada posisi yang lebih rendah sehingga harus mengikuti arah kebijakan yang telah ditentukan. Kondisi ini dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang jika kewenangan hanya terpusat pada birokrasi. Pada penelitian yang dilakukan Rohadi *et al* (2025) di Kelurahan Jatirasa terbukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan Karang Taruna dapat meningkatkan partisipasi pemuda serta memperkuat kegiatan sosial ketika hubungan tersebut bersifat terbuka dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa hierarki tidak selalu menjadi hambatan, tetapi dapat berfungsi secara positif jika digunakan untuk mendukung keterlibatan pemuda. Dengan demikian, relasi birokrasi perlu dilihat sebagai ruang interaksi yang dapat berubah tergantung pada cara kewenangan dijalankan (Nasyirudin, 2025).

Dalam dimensi aturan formal dan rasionalitas, Weber (1978) menekankan bahwa birokrasi bekerja berdasarkan prosedur yang bertujuan menciptakan keteraturan dan efisiensi. Dalam konteks kegiatan kepemudaan, aturan ini terlihat dalam mekanisme perizinan, pengelolaan anggaran, serta pelaporan kegiatan. Aturan tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas, namun sering kali membuat kegiatan menjadi kurang fleksibel (Patty *et al* (2025). Pada penelitian Maghfiro (2025) menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda melalui Karang Taruna dapat berjalan efektif ketika organisasi memiliki ruang untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa rasionalitas birokrasi tidak cukup hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak nyata bagi pemuda. Oleh karena itu, teori Weber (1978) dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana birokrasi bekerja, tetapi juga membantu melihat bagaimana struktur tersebut dapat

mendukung atau justru membatasi proses pemberdayaan. Dengan cara ini, relasi antara kelurahan dan Karang Taruna dapat dipahami sebagai hubungan yang terus bergerak antara aturan dan kebutuhan sosial dalam pengembangan kegiatan kepemudaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan penelitian ini, diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu tidak hanya memberikan gambaran mengenai arah kajian yang telah dilakukan, tetapi juga membantu mengidentifikasi temuan utama serta kesimpulan yang menjadi dasar dalam melihat celah penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat ditempatkan secara lebih jelas dalam peta kajian yang telah ada.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Ananta Bagus Prasetya & M. Jacky (2024)	Relasi Dualitas Karang Taruna dengan Pemerintah Desa	Temuan penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki peran sebagai agen yang aktif dalam negosiasi dengan pemerintah desa, namun dalam banyak kasus keberadaannya hanya bersifat formalitas dan kurang produktif. Interaksi antara struktur dan agen tidak berjalan optimal sehingga menghambat pengembangan organisasi pemuda. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa relasi yang terbentuk masih belum mampu mendorong kemandirian Karang

		Taruna secara maksimal.
Grein George Theodoron Wutoy & Tri Nugroho (2022)	Relasi Pemerintah dan Masyarakat Kampung dalam Pengembangan Kampung Wisata Berap	Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah dan masyarakat menghasilkan dampak ekonomi dan sosial, namun belum berjalan optimal karena pengelolaan yang tidak tepat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, partisipasi masyarakat masih terbatas dan belum merata. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kepercayaan dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Yuli Setyowati, Fadjarini Sulistyowati, & Habib Muhsin (2022)	Upaya Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak	Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan keterampilan masyarakat. Program berjalan efektif karena adanya dukungan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan lembaga sosial termasuk Karang Taruna. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa komunikasi partisipatif dan komitmen pemerintah desa menjadi faktor

		kunci keberhasilan program pemberdayaan.
Cindy Aulia Kamal (2023)	Peran Aparat Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung	Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparatur kelurahan telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui prinsip transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Namun, terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas karena masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan dan kurangnya data pendukung. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa peran aparatur cukup efektif, tetapi masih perlu penguatan dalam implementasi agar pemberdayaan berjalan lebih optimal.
Irmawati, Suardi Mukhlis, & Salman (2025)	Dari Desa untuk Desa: Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lokal	Temuan pada buku ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sering kali masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun terdapat praktik baik di beberapa wilayah, partisipasi substantif masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan

		partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan lokal yang berkelanjutan.
--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar penelitian menyoroti pentingnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan lokal, namun belum secara spesifik menempatkan relasi birokrasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna sebagai fokus utama. Temuan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada efektivitas hubungan kelembagaan, distribusi peran, serta tingkat partisipasi yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan pada bagaimana struktur birokrasi memengaruhi relasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna dalam pengembangan kegiatan kepemudaan di wilayah perkotaan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relasi birokrasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna dalam pengembangan kegiatan kepemudaan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi yang intensif dan mendalam. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya berupa angka, tetapi juga berupa makna, persepsi, dan pengalaman yang berkaitan dengan dinamika hubungan kelembagaan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip birokrasi bekerja dalam praktik serta bagaimana relasi tersebut memengaruhi pelaksanaan kegiatan kepemudaan di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk menjelaskan fenomena yang bersifat kompleks dan kontekstual dalam lingkungan sosial masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tegal Parang yang berada di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Secara spesifik, lokasi penelitian berada di lingkungan RW 006 dengan kode pos 12790. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Tegal Parang memiliki aktivitas kepemudaan yang melibatkan Karang Taruna serta adanya interaksi langsung dengan aparatur kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sosial. Selain itu, wilayah ini merepresentasikan karakter

masyarakat perkotaan yang memiliki dinamika birokrasi dan partisipasi sosial yang cukup kompleks. Dengan demikian, lokasi ini dianggap relevan untuk mengkaji relasi birokrasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna dalam pengembangan kegiatan kepemudaan.

Waktu penelitian dilaksanakan selama dua minggu, dimulai pada tanggal 1 Mei 2026 hingga 5 Juni 2026. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Pemilihan durasi penelitian disesuaikan dengan kebutuhan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai dinamika relasi kelembagaan yang diteliti. Selama periode tersebut, peneliti melakukan interaksi langsung dengan informan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait fenomena yang diteliti. Dengan waktu penelitian yang telah ditentukan, diharapkan data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi yang aktual dan relevan dengan fokus penelitian.

3.3 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang ditetapkan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara objektif, valid, dan dapat diandalkan. Objek penelitian mengarah pada apa yang menjadi fokus utama kajian, baik berupa fenomena, aktivitas, maupun hubungan sosial yang ingin dipahami secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, objek penelitian tidak selalu berupa variabel yang terukur, tetapi lebih pada fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan objek penelitian menjadi penting untuk memperjelas arah analisis yang akan dilakukan oleh peneliti.

Objek dalam penelitian ini adalah relasi birokrasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna dalam pengembangan kegiatan kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana struktur birokrasi memengaruhi pola hubungan antara kedua

aktor tersebut, termasuk dalam hal koordinasi, pembagian peran, serta pelaksanaan kegiatan kepemudaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana prinsip birokrasi, seperti hierarki kewenangan, aturan formal, dan rasionalitas kerja, diterapkan dalam praktik hubungan kelembagaan. Dengan demikian, objek penelitian ini tidak hanya melihat interaksi yang terjadi, tetapi juga menelaah bagaimana sistem birokrasi membentuk dinamika hubungan tersebut.

3.4 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2019), data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau informan utama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Data ini dikumpulkan oleh peneliti secara langsung tanpa melalui perantara, sehingga memiliki tingkat keaslian dan relevansi yang tinggi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data primer menjadi sumber utama untuk memahami fenomena sosial secara mendalam karena diperoleh dari pengalaman, persepsi, dan pengetahuan informan. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan aparatur kelurahan serta pengurus Karang Taruna di Kelurahan Tegal Parang.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut Moleong, data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, serta literatur yang relevan dengan penelitian. Data ini berfungsi untuk melengkapi data primer serta memberikan gambaran yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder membantu peneliti dalam melakukan triangulasi data sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan

dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi kelurahan, peraturan perundang undangan, laporan kegiatan Karang Taruna, serta berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2019) yaitu terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2019), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai suatu fenomena. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara lebih terbuka dan mendalam terkait pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan mengenai relasi birokrasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk menemukan permasalahan yang tidak tampak secara langsung serta membuka ruang diskusi yang memungkinkan informan menyampaikan pendapat dan ide secara lebih bebas. Dengan demikian, wawancara mendalam diharapkan mampu memberikan data yang kaya dan komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

3.5.2 Observasi

Menurut Moleong (2018), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan untuk memahami perilaku dan situasi sosial secara nyata. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas aparatur kelurahan dan Karang Taruna dalam pelaksanaan

kegiatan kepemudaan. Observasi atau pengamatan langsung merupakan cara untuk melihat bagaimana suatu peristiwa terjadi serta bagaimana interaksi antar aktor berlangsung dalam situasi yang sebenarnya. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, observasi membantu peneliti dalam memahami realitas sosial yang tidak selalu dapat diungkap melalui wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan yang mendukung hasil wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara merekam jejak kegiatan penelitian, seperti foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti empiris yang dapat memperkuat hasil analisis penelitian. Dengan demikian, teknik dokumentasi membantu meningkatkan validitas data melalui pembuktian yang bersifat tertulis maupun visual.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, Sugiyono (2019) berpendapat bahwa teknik analisis data adalah kegiatan dalam penelitian data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Adapun penjelasan dari aktivitas analisis data, yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyaringan terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu relasi birokrasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sementara data yang penting akan dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan tema penelitian. Proses reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti dalam memfokuskan analisis pada hal hal yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel yang menggambarkan hubungan antar data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara terstruktur sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data. Dengan demikian, tahap ini membantu dalam proses penarikan kesimpulan yang lebih akurat.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang bertujuan untuk menemukan makna dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar benar didukung oleh data yang valid. Dalam penelitian ini, penarikan

kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis data terkait relasi birokrasi antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab rumusan masalah serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Tegal Parang

Kelurahan Tegal Parang merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Wilayah ini termasuk dalam kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta aktivitas sosial ekonomi yang dinamis. Sebagai bagian dari wilayah metropolitan, Kelurahan Tegal Parang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen, baik dari segi latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Kondisi ini turut memengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam aktivitas kepemudaan yang berkembang di lingkungan setempat. Aparatur kelurahan memiliki peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan sekaligus memfasilitasi berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Keberadaan organisasi seperti Karang Taruna menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung kegiatan kepemudaan di wilayah ini. Oleh karena itu, Kelurahan Tegal Parang menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji relasi birokrasi dalam pengembangan kegiatan kepemudaan.

4.1.1 Kondisi Geografis

Kelurahan Tegal Parang berada di bagian timur wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan Rencana Bagian Wilayah Kota tahun 1985 sampai 2005, wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan permukiman penduduk. Kelurahan Tegal Parang memiliki luas sekitar 105,60 hektare yang terbagi ke dalam 7 Rukun Warga dan 66 Rukun Tetangga. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan IV yang berada di Kelurahan Mampang Prapatan. Pada bagian timur, batas wilayahnya ditandai oleh Kali Cideng

yang bersebelahan dengan Kelurahan Pancoran di Kecamatan Pancoran. Sementara itu, bagian selatan berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XV yang terhubung dengan Kelurahan Duren Tiga. Adapun di sisi barat, wilayah Kelurahan Tegal Parang berbatasan dengan Kali Mampang yang berdekatan dengan Kelurahan Pela Mampang.

4.1.2 Luas Kelurahan Tegal Parang, menurut Jenis Tanah

Tabel 2. Luas Kelurahan Tegal Parang (Jenis Tanah)

NO.	JENIS TANAH	LUAS (Ha)	KETERANGAN
1.	Tanah Darat	105.60 Ha	-
2.	Tanah Sawah	-	-
3.	Tanah Rawa	-	-
4.	Lain-lain	-	-
	Jumlah	105,60 Ha	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.1.3 Luas Kelurahan Tegal Parang, Menurut Peruntukkan Tanah

Tabel 3. Luas Kelurahan Tegal Parang (Peruntukkan Tanah)

NO.	PERUNTUKKAN TANAH	LUAS (Ha)	KETERANGAN
1.	Perumahan	75 Ha	-
2.	Industri	-	-
3.	Fasilitas Umum	5,00 Ha	-
4.	Pemukaman	3,60 Ha	-

5.	Lain-lain	22 Ha	-
	Jumlah	105,60 Ha	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.1.4 Data Jumlah RT dan RW

Tabel 4. Data Jumlah RT dan RW Kelurahan Tegal Parang

NO.	RW	JUMLAH RT	KETERANGAN
1.	01	13	-
2.	02	10	-
3.	03	10	-
4.	04	8	-
5.	05	8	-
6.	06	9	-
7.	07	8	-
Jumlah	7	66	

Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.1.5 Sarana Gedung Pemerintah

Tabel 5. Sarana Gedung Pemerintah

No.	Nama	Alamat
1.	Gedung Kantor Kelurahan	Jalan Tegal Parang Selatan V
2.	Rumah Dinas Lurah	Jalan Tegal Parang Selatan V
3.	Gedung Puskesmas	Jalan Tegal Parang Selatan V
4.	Gedung SDN Tegal Parang 01 Pg	Jalan Mampang Prapatan VIII, Gg. Senang
5.	Gedung SDN Tegal Parang 03 Pg	Jalan Mampang Prapatan VIII
6.	Gedung SDN Tegal Parang 05 Pg	Jalan Mampang Prapatan VI Gg. BB No. 36

7.	Gedung SDN Tegal Parang 06 Pg	Jalan Mampang Prapatan XIII
8.	Gedung SMPN 104	Jalan Mampang Prapatan XIII
9.	Gedung SMPN 247	Jalan Mampang Prapatan XIII

Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.2 Data Demografi

Berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Tegal Parang, sampai akhir Semester II Tahun 2025 penduduk Kelurahan Tegal Parang berjumlah 39.725, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk laki-laki : 20.064 Jiwa
2. Jumlah Penduduk perempuan : 19.661 Jiwa

sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) sampai dengan akhir Bulan Semester II Tahun 2025 tercatat sebanyak 13.035 KK, dengan rincian:

1. Jumlah KK laki-laki : 10.104 KK
2. Jumlah KK perempuan : 2.931 KK

4.2.1 Jumlah Penduduk, Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 6. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

NO.	UMUR	WNI			WNA			JUMLAH
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	0-4	1440	1290	2730			-	2.730
2	5-9	1728	1595	3323			-	3.323
3	10-14	1713	1646	3359	1	1	2	3.361
4	15-19	1686	1600	3286	1		1	3.287
5	20-24	1584	1541	3125			-	3.125
6	25-29	1445	1486	2931			-	2.931

7	30–34	1543	1559	3102			-	3.102
8	35–39	1574	1563	3137			-	3.137
9	40–44	1692	1698	3390	1	1	2	3.392
10	45–49	1568	1562	3130			-	3.130
11	50–54	1366	1302	2668			-	2.668
12	55–59	1119	1012	2131			-	2.131
13	60–64	747	762	1509			-	1.509
14	65–69	430	497	927			-	927
15	70–74	251	302	553			-	553
16	75–keatas	173	244	417			-	417
	Jumlah	20059	19659	39718	3	2	5	39.723

Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.2.2 Data Penduduk per-RW

Tabel 7. Data Penduduk per-RW

RW	WNI			WNA			KK		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
01	3.104	2.927	6.031	-	1	1	1.533	489	2.022
02	2.884	2.764	5.648			-	1.510	225	1.735
03	3.729	3.702	7.431			-	1.391	457	1.848
04	2.732	2.692	5.424			-	1.375	468	1.843
05	3.137	3.098	6.235			-	1.390	377	1.767
06	2.907	2.902	5.809			-	1.551	549	2.100
07	1.528	1.558	3.086			-	1.354	366	1.720
Jumlah	20.021	19.643	39.664	-	1	1	10.104	2.931	13.035

Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan (Usia 15 Tahun keatas)

Gambar 2. Data Penduduk Berdasar Profesi



Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.2.4 Jumlah Penduduk Berdasar Agama

Gambar 3. Data Penduduk Berdasar Agama



Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan (Usia 7 Tahun keatas)

Gambar 4. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.3 Struktur Organisasi

4.3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Parang

Gambar 5. Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Parang



Sumber: Buku Profil Kelurahan Tegal Parang (2025)

4.3.2 Struktur Organisasi Karang Taruna RW 06

Menurut surat keputusan Karang Taruna Kelurahan Tegal Parang (2022), dengan nomor 002/SK/KT-Kel/Tegal Parang/I/2022. Berikut struktur organisasi Karang Taruna RW 06:

1. Pembina : LMK RW 06
2. Penasehat : Ketua RW 06
3. Ketua : Arifin
4. Wakil Ketua : Reva Dwi Ananda
5. Sekretaris : Silfiya
6. Wakil Sekretaris : Keiko Fadia Fadhilla
7. Bendahara : Ahmad Sofyan
8. Wakil Bendahara : Alfidha Yusuf
9. Seksi-Seksi:
 - A. Pendidikan dan Pelatihan
 1. Wildan
 2. Sofyan
 3. Melati
 - B. Kerohanian dan Pembinaan Mental
 1. Fajrina
 2. Nur Aini
 - C. Olah Raga dan Seni Budaya
 1. Ayubi
 2. Iqbal
 - D. Hubungan Masyarakat, Publikasi, Pencitraan Karang Taruna
 1. Nabila
 2. Indah

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Bentuk Hubungan Kelurahan dan Karang Taruna dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Kelurahan Tegal Parang dan Karang Taruna RW 06 terbangun melalui pola pembinaan, koordinasi, dukungan fasilitas dan sumber daya, serta partisipasi aktif organisasi kepemudaan dalam berbagai kegiatan sosial. Hubungan tersebut tercermin dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, peringatan hari besar nasional, kegiatan olahraga, serta program pemberdayaan pemuda yang dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan. Aparatur kelurahan berperan sebagai pembina, fasilitator, dan pemberi dukungan administratif, sedangkan Karang Taruna berperan sebagai pelaksana utama kegiatan yang melibatkan pemuda dan masyarakat. Hubungan yang terjalin tidak bersifat satu arah, melainkan menunjukkan adanya kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan fungsi masing masing lembaga. Keberadaan komunikasi yang baik, koordinasi yang rutin, serta dukungan fasilitas dari kelurahan menjadi faktor yang memperkuat hubungan tersebut. Meskipun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan dana, kesibukan anggota, dan belum meratanya keterlibatan pemuda, secara umum hubungan antara kelurahan dan Karang Taruna berjalan cukup baik dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang.

6.1.2 Relasi Birokrasi Aparatur Kelurahan dan Karang Taruna dalam Pengembangan Kegiatan Kepemudaan

Berdasarkan analisis menggunakan teori birokrasi Max Weber, relasi birokrasi antara aparaturn Kelurahan Tegal Parang dan Karang Taruna menunjukkan karakteristik birokrasi yang cukup jelas. Pada dimensi pembagian kerja, terdapat pemisahan tugas yang tegas antara kelurahan sebagai pembina dan fasilitator dengan Karang Taruna sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Pada dimensi hierarki kewenangan, posisi kelurahan sebagai lembaga pemerintahan dan Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai pembina kegiatan kepemudaan menunjukkan adanya struktur kewenangan yang teratur dan dipahami oleh seluruh pihak. Pada dimensi aturan formal, hubungan kedua lembaga dijalankan melalui mekanisme administrasi, konsultasi kegiatan, penggunaan fasilitas, serta pelaporan kegiatan yang mendukung keteraturan pelaksanaan program. Pada dimensi rasionalitas, keputusan dan dukungan yang diberikan oleh kelurahan didasarkan pada kebutuhan organisasi, manfaat kegiatan, serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa birokrasi dalam hubungan ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem administrasi, tetapi juga sebagai sarana koordinasi yang mendukung pengembangan kegiatan kepemudaan. Dengan demikian, relasi birokrasi yang terbangun memperlihatkan penerapan prinsip birokrasi Weber melalui pembagian kerja, hierarki kewenangan, aturan formal, dan rasionalitas yang berjalan secara relatif efektif dalam pengembangan kegiatan kepemudaan.

6.1.3 Implikasi Relasi Birokrasi terhadap Pengembangan Kegiatan Kepemudaan

Relasi birokrasi yang terjalin antara aparaturn kelurahan dan Karang Taruna memberikan implikasi yang positif terhadap pengembangan kegiatan kepemudaan di Kelurahan Tegal Parang. Implikasi pertama terlihat pada meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna.

Implikasi kedua terlihat pada penguatan kapasitas organisasi melalui pengalaman dalam perencanaan program, koordinasi kegiatan, pengelolaan administrasi, dan pelaporan kegiatan. Implikasi ketiga tampak pada meningkatnya kemandirian pemuda dalam menyusun dan menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hubungan yang baik antara kelurahan dan Karang Taruna juga berkontribusi terhadap keberlanjutan kegiatan kepemudaan karena didukung oleh komunikasi yang rutin, pembinaan yang berkelanjutan, serta dukungan sumber daya yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi birokrasi yang berjalan secara efektif mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi pemuda sekaligus memperkuat peran organisasi kepemudaan dalam kehidupan masyarakat.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Aparatur Kelurahan

Aparatur Kelurahan Tegal Parang diharapkan dapat terus memperkuat pola pembinaan dan pendampingan terhadap Karang Taruna melalui komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Dukungan terhadap kegiatan kepemudaan perlu terus ditingkatkan, baik dalam bentuk fasilitasi administrasi, penyediaan sarana kegiatan, maupun penguatan akses terhadap program pemberdayaan pemuda. Kelurahan juga perlu mendorong keterlibatan pemuda yang lebih luas agar kegiatan kepemudaan tidak hanya terpusat pada anggota yang aktif, tetapi mampu menjangkau lebih banyak pemuda di lingkungan kelurahan. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan untuk memperluas peluang kerja sama yang mendukung pengembangan kegiatan kepemudaan secara berkelanjutan.

6.2.2 Bagi Karang Taruna

Karang Taruna diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas organisasi melalui penguatan manajemen organisasi, pengembangan program yang

lebih inovatif, serta peningkatan keterlibatan anggota dalam setiap kegiatan. Organisasi juga perlu memperluas bentuk kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial dan seremonial, tetapi juga mengarah pada pengembangan keterampilan, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi pemuda. Upaya regenerasi kepengurusan perlu diperkuat agar keberlangsungan organisasi dapat terjaga dengan baik. Selain itu, Karang Taruna perlu meningkatkan pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi, publikasi kegiatan, dan penguatan partisipasi pemuda dalam organisasi.

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada hubungan antara aparaturnya kelurahan dan Karang Taruna dalam satu wilayah kelurahan sehingga ruang lingkup penelitian masih terbatas. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan membandingkan beberapa kelurahan atau wilayah yang memiliki karakteristik sosial yang berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan perspektif teori yang berbeda, seperti teori jaringan sosial, teori modal sosial, atau teori tata kelola kolaboratif untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara organisasi kepemudaan dan pemerintah lokal. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji dampak kegiatan kepemudaan terhadap perubahan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan kapasitas pemuda secara lebih mendalam sehingga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan kajian sosiologi organisasi dan kepemudaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, S. N., Lorens, D., Iskandar, A. A., Rachman, R. M., Kusuma, A., & Sya'ban, A. R. (2024). *Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial desa*. Tohar Media.
- Arianto, T. (2024). *Realitas budaya masyarakat urban*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Budiman, S. (2026). *Dialektika birokrasi pemerintahan*. Minhaj Pustaka.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hertati, D. (2024). *Reformasi birokrasi tataran pemerintahan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Irmawati, Mukhlis, S., & Salman. (2025). *Dari desa untuk desa: Dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasyirudin, M. (2025). *Sosiologi pemerintahan*. CV Eureka Media Aksara.
- Salim, K. (2023). *Kompleksitas dan dinamika birokrasi di Indonesia*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tohari, A. (2025). *Sosiologi pembangunan pedesaan*. Penerbit Naga Pustaka.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Karya asli diterbitkan 1922).

Jurnal

- Baihaqi, A., & Martino, R. (2021). Efek komunikasi dalam organisasi Karang Taruna. *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(01), 54–78.
- Bastian, A. P., & Farihin, A. (2025). Peran Karang Taruna dalam pemberdayaan pemuda Desa Pasirbungur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE BII Bekasi*, 5(1), 169–177.
- Darmawati, Mahfuddin, M., & Syamjaya, S. (2022). Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan desa (Studi kasus pada Karang Taruna Desa Tombang). *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 5(1), 11–20.
- Erlangga, D. (2025). Inovasi dan efektivitas manajemen pelayanan publik dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(05 Oktober), 7846–7856.
- Fardiansyah, R., Srimudin, A., & Riady, N. (2025). The role of youth organization in improving human resources in South Sumatra Province. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01).
- Fauziah, I., & Astuti, N. P. (2023). Pemberdayaan pemuda melalui pembentukan Karang Taruna. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Hilman, C. (2025). Kontribusi pemuda dalam pembangunan sosial dan inovasi. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* (Vol. 2, No. 3, hlm. 548–563).
- Jaya Gunara, A. (2025). Makna Hari Sumpah Pemuda dalam gerakan kebangsaan PPM Kabupaten Bogor: Studi eksistensi organisasi kepemudaan. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 90–101.
- Maghfiro, L. (2025). Pemberdayaan pemuda oleh pengurus Karang Taruna Bocah Padeg (BOPA) dalam bidang sosial dan ekonomi di Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(11), 61–70.
- Muntazar, N. (2026). Peran pendidikan nonformal dalam membentuk karakter dan kepemimpinan pemuda di era digital. *Jurnal Pemuda Indonesia*, 2(2).

- Muslim, & Sari. (2025). Organisasi kepemudaan sebagai agen perubahan: Studi Karang Taruna dalam pengembangan ekonomi lokal. *Antropocene Journal*.
- Patty, J., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2025). Strategi efektifitas penganggaran berbasis kinerja dalam program pengembangan pemuda dan olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2816–2825.
- Perbawa, I. K. S. L. P., & Najicha, F. U. (2022). Tantangan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 3(3), 170–178.
- Prasetya, A. B., & Jacky, M. (2024). Relasi dualitas Karang Taruna dengan pemerintah desa (Studi strukturasi Karang Taruna di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan). *Paradigma*, 13(3), 141–148.
- Pribadi, U. (2021). Bureaucratic reform, public service performance, and citizens' satisfaction: The case of Yogyakarta, Indonesia. *Public Policy and Administration*, 20(2), 312–326.
- Rahman, N. H., Thaha, R., & Arifin, I. (2024). Kinerja pemerintah kelurahan dalam pelayanan masyarakat: Tinjauan dari Kelurahan Molinow di Kota Kotamobagu. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 674–688.
- Ramadhani, A., Harianja, H. E., Apriliani, D., Mentari, A., & Sulaksono, T. P. (2025). Karang Taruna Kemiling sebagai pilar integrasi kepemudaan dalam inovasi sosial dan pemberdayaan ekonomi guna membangun masyarakat di era digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 519–530.
- Rasidah, F. (2025). Peran penting Karang Taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda sebagai bagian dari gerakan warga negara. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Cerdas (JAPAKESADA)*, 81–89.
- Rizkiyani, S., & Mujab, S. (2024). Kekuasaan dan wewenang dalam perspektif sistem pemerintahan. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 82–93.

- Rohadi, G. S., Ningsih, S., & Setyawati, K. (2025). Dampak kolaborasi Karang Taruna sebagai mitra pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jatirasa Kota Bekasi. *WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 114–129.
- Saharuddin, S., Amaliah, Y., & Ismail, A. (2025). Pengembangan Karang Taruna Digital Service (Ktds): Inovasi Penguatan Peran Pemuda Dalam Layanan Sosial Desa Berbasis Teknologi Informasi. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 89-97.
- Setiyowati, S. W., & Indiraswari, S. D. (2025). Moderating role of community participation in the relationship between organizational commitment, good corporate governance, and apparatus performance. *Keunis*, 13(2), 176–187.
- Setyawati, Y., Sulistyowati, F., & Muhsin, H. (2022). Upaya pemerintah desa dalam optimalisasi komunikasi pemberdayaan keluarga menuju desa layak anak. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(2), 112–128.
- Simanjuntak, T. P. M., & Suyato, S. (2025). Peranan organisasi Karang Taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial generasi muda sebagai gerakan warga negara. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2694–2703.
- Soliha, I. A., Dheasari, A. E., Wahyudi, M., & Robbaniyah, A. (2024). Penguatan peran Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jangur melalui program pengabdian masyarakat. *BAHRI*, 1(1), 49–62.
- Susilo, H., Widodo, W., Mardiyah, S., & Nusantara, W. (2025). Pelibatan Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata Kabupaten Gresik. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(3).
- Tjenreng, M. B. Z., Ali, H., & Nawawi, M. (2019). Capacity building kelembagaan pemuda dan olahraga dalam sinergi dan optimalisasi kebijaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Wutoy, G. G. T., & Nugroho, T. (2022). Relasi pemerintah dan masyarakat kampung dalam pengembangan kampung wisata Berap, Distrik

Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(3), 124–136.

Yulambangari, V. N., Prमितasari, M. R., & Khansa, S. N. (2025). Analisis yuridis terhadap pengawasan kinerja aparatur kelurahan dalam sistem pemerintahan lokal berdasarkan konstitusi. *Lex et Societas: Journal of Law and Society*, 1(1), 9–22.

Tugas Akhir

Albano Bima, D. (2024). *Optimalisasi peran Karang Taruna dalam meningkatkan kemampuan interpersonal remaja (Studi di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Bandarlampung)*.

Kamal, C. A. (2023). *Peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung*.

Lela, W. (2025). *Peran aparatur desa dalam menyelesaikan konflik pemuda di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat*.

Lestari, C. A. (2022). *Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan ekonomi desa (Studi Karang Taruna Desa Tombang)* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Mahbubi, M. F. (2025). *Efektivitas tugas kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara).

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Pemerintah

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna*.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.*

Dokumen Organisasi dan Profil Institusi

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistics of Indonesian Youth 2025.* BPS RI.

Karang Taruna Kelurahan Tegal Parang. (2022). *Surat Keputusan Karang Taruna Kelurahan Tegal Parang Nomor 002/SK/KT-Kel/Tegal Parang/I/2022 tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Tegal Parang.*
Karang Taruna Kelurahan Tegal Parang.

Kelurahan Tegal Parang. (2025). *Buku Profil Kelurahan Tegal Parang Tahun 2025.* Kelurahan Tegal Parang.